



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR 933/III /XI/2016

**Parlemen Remaja Siapkan Generasi
Muda Jadi Pimpinan Masa Depan**

**Jadikan Aksi 4 November
Pelajaran Untuk Pejabat Publik**

**Papua Butuh Program
Percepatan Bidang Pendidikan**



GRATIS
Tidak Diperjualbelikan



Parlemen Remaja Siapkan Generasi Muda Jadi Pimpinan Masa Depan

Ketua DPR RI Ade Komarudin membuka Simulasi Sidang Parlemen Remaja 2016 dan berharap kegiatan tersebut bisa dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para peserta untuk lebih mengenal parlemen lebih dekat.

“Kegiatan ini penting dalam menyiapkan generasi muda untuk menjadi pimpinan masa depan. Pengenalan dari segi teori sudah dibekali oleh beberapa narasumber, sekarang simulasinya. Saya berikan arahan bagaimana mereka mengenali parlemen ini dengan baik,” ujar Akom sapaan akrabnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (10/11).

Bertepatan dengan Hari Pahlawan ini, Akom berharap generasi penerus ini bisa menjadi pejuang dalam membangun bangsa Indonesia di era globalisasi. “Momentumnya kebetulan bertepatan dengan hari Pahlawan. Pengertian pahlawan di zaman ini harus diperluas. Di zaman lalu kita telah melakukan perjuangan melawan penjajah, sekarang adalah berjuang melawan penjajahan di bidang lain terutama menghadapi era globalisasi,” tuturnya.

Lebih lanjut, Akom mengungkapkan kegiatan Parlemen Remaja 2016 yang bertemakan DPR RI Menuju Parlemen Modern ini penting untuk bekal mereka dimasa depan jika ingin menjadi anggota bahkan Ketua DPR RI kelak.

“Mereka mengikuti kegiatan ini penting agar nanti kalau mau masuk jadi Anggota DPR RI tidak gagap lagi. Atas inisiatif itu, Akom berharap ke depannya bisa dilanjutkan dengan parlemen mahasiswa, karena ini pasti bermanfaat bagi generasi muda kita di suatu ketika,” ungkapnya.

Saat Akom menanyakan kepada peserta, apakah ada diantara adik-adik yang ingin menjadi politisi? Dengan sigap semua mengacungkan tangan. Reaksi tersebut membuat Akom menceritakan bagaimana dirinya bisa masuk bahkan duduk di kursi Ketua DPR RI.

Bagi yang ingin menjadi politisi, dia berpesan kuncinya adalah selain rajin membaca buku juga harus aktif di suatu organisasi. “Jadi apa yang sudah dipelajari di buku, bisa dipraktekkan di organisasi. Saya mengajarkan anak saya harus aktif organisasi, apa saja, saya mulai dari Ketua Osis di SMP hingga SMA,” jelasnya.

Acara simulasi Parlemen Remaja digelar Biro Pemberitaan Parlemen bekerja sama dengan Universitas Indonesia. Kegiatan yang berlangsung 6-11 November 2016 ini merupakan serangkaian pelatihan, pembekalan, dan simulasi sidang DPR RI yang digelar langsung di Gedung Nusantara, Senayan Jakarta. Dengan mengangkat tema “DPR Menuju Parlemen Modern”, diharapkan lahir pemikiran segar para pemuda SMA yang mampu membawa angin baru bagi parlemen Indonesia. ■

(rnm, rnp)

Jadikan Aksi 4 November Pelajaran Untuk Pejabat Publik

Unjuk rasa 4 November telah menyedot perhatian publik, tidak hanya dalam skala nasional, bahkan media luar pun tidak mau ketinggalan dalam menyiarkan tragedi demonstrasi, yang mencuat akibat kekecewaan segolongan besar umat Islam, di Pusat Jakarta, tepatnya area ring satu Istana Negara penuh sesak dengan kerumunan masa yang menuntut keadilan.

Para demonstran tidak terima dengan perilaku calon Gubernur DKI Jakarta petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang dinilai telah melecehkan ajaran Islam. Ketua DPR RI Ade Komarudin menyadari betul, umat Islam di Indonesia tidak terima agamanya dilecehkan. "Ini pelajaran bagi semua pejabat publik. Mulutmu itu bisa setajam pisau. Pelajaran buat kita semua," tandasnya di Ruang Tamu Ketua, Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (9/11).

Akom sapaan akrab Ketua DPR RI beranggapan hendaknya pejabat publik menjadi contoh teladan dalam berperilaku santun, terlebih lagi jika menyinggung soal keyakinan, harus hati-hati jangan sampai ada yang merasa disakiti. "Agama apapun tidak ada yang mau dilecehkan," paparnya.

Akom mengatakan persoalan Ahok adalah ujian yang berat buat negara ini. Pemerintah diuji seberapa besar kemampuannya menghadapi tuntutan publik yang mendamba keadilan. Pasalnya masyarakat

penganut agama Islam sangat sensitif jika ajaran agamanya disinggung, terlebih lagi



Ketua DPR RI Dr. H. Ade Komarudin, M.H.

bertepatan dengan momentum politik, pilkada serentak. "Kalau soal agama *alarmnya* sangat peka. Kita tidak boleh main-main," ujarnya.

Akom berharap pemerintah bisa mengelola

permasalahan ini dengan bijak. Tidak ada pihak yang dirugikan. Pemerintah menghadapi

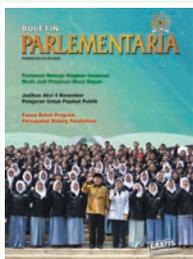
tuntutan publik juga harus proporsional, dan tidak bersikap keras. "Jangan ada kesan umat Islam memusuhi pemerintah, juga sebaliknya. Jangan sampai ada kesan pemerintah memusuhi umat Islam," jelasnya.

Setelah aksi demonstrasi Presiden Joko Widodo menyambangi Gedung Pusat Dakwah PP Muhammadiyah dan PB Nahdlatul

Ulama. Akom memberi pujian atas respon presiden yang cepat, dia menyampaikan apresiasi kepada presiden yang sudah menjalin komunikasi politik dengan baik kepada seluruh lapisan umat beragama. ■

(foto: Foto: Rumi/br)

BULETIN PARLEMENTARIA



PENGAWAS UMUM Pimpinan DPR RI **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH** Dr. Winantuningtyas Titi Swasanany, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI) **WAKIL KETUA PENGARAH** Dra. Damayanti, M.Si (DEPUTI PERSIDANGAN) **PIMPINAN PELAKSANA** Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen) **PIMPINAN REDAKSI** Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak) **WK. PIMPINAN REDAKSI** Dra. Tri Hastuti (Kasubag Media Cetak), Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis), Insan Abdirrohman, S.H, M.Si (Kasubag MedSos dan Website) **REDAKTUR** Mastur Prantono, Nita Juwita, S.Sos **SEKRETARIS REDAKSI** Suciati, S.Sos, Bagus Mudjiharjanto **ANGGOTA REDAKSI** Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati, Muhammad Husen, Sofyan Efendi, Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko, Ria Nur Mega **REDAKTUR FOTO** Eka Hindra, Iwan Armanias **FOTOGRAFER** Rizka Arinindya, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah, Andi M.Iham, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni, Azka Restu Fadilah **ADMINISTRASI FOTO** Hasri Mentari **ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA** Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI Gedung Nusantara II Lt. 3 Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com, www.dpr.go.id/berita

PIMPINAN PENERBITAN Djustiawan Widjaya, S.Sos. M.AP (Kabag Penerbitan), **WK. PIMPINAN PENERBITAN** Mediantoro, SE (Kasubag Produksi), Pesta Evaria Simbolon, SE. M.Si (Kasubag Distribusi) **STAFF PRODUKSI** Eko Murdiyanto, Barliansyah, Fathurahman, Mujiono, Farid, SE **SIRKULASI** Abdul Kahfi, S.Kom, Remon Ifan, Siti Rondiyah, Oji **Telp.** 021-571 5697 **Fax.** 021-571 5421 **Email** penerbitandpr@gmail.com

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS) | ISI BERITA DAN MATERI FOTO DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN |

Fadli Zon Buka Parlemen Remaja 2016

Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam, Fadli Zon secara resmi membuka orientasi Parlemen Remaja 2016. Inilah momen penting menyiapkan generasi muda menjadi pemimpin masa depan.

Berempat di Bogor, Jawa Barat, Selasa (7/11), Fadli menyerukan generasi muda agar mau terjun ke gelanggang politik untuk ikut membangun bangsa. Dan salah satu wadah penting dalam berpolitik adalah parpol dan parlemen.

Keberadaan parlemen, lanjut Fadli, sangat penting untuk menciptakan *check and balances* terhadap semua kebijakan pemerintah. "Berpolitik itu indah dan politik itu tidak kotor. Semua bergantung pada pribadi politisi yang bersangkutan," katanya di hadapan para peserta.

Panggung politik nasional harus diisi putra putri terbaik bangsa. Dan orang-orang baik jangan diam saja menjadi penonton. Dia harus tampil berpolitik, ucap Fadli. Dengan menjadi



Suasana Acara pembukaan Parlemen Remaja 2016 di Bogor

politisi, semua pihak bisa ikut serta merumuskan kebijakan publik yang pro rakyat.

Pada kesempatan tersebut, Fadli juga menjelaskan sejarah panjang politik nasional. Indonesia merupakan negara demokratis terbesar ketiga setelah Amerika dan India.

Sebelumnya, Sekjen DPR RI Winantuningtyas Titi Swasanany menjelaskan, acara ini diikuti 136 peserta

dari 34 provinsi di Indonesia. Mereka terpilih dari tiga ribuan peserta yang mendaftar. Satu provinsi diwakili empat siswa dari SMA, SMK, atau MA.

Para siswa ini melakukan banyak kegiatan layaknya seorang anggota dewan. Pada Selasa, misalnya, para siswa menggelar simulasi rapat DPR RI. Dilanjutkan dengan simulasi rapat-rapat komisi. Bahkan, para peserta juga melakukan simulasi kunjungan kerja ke Cianjur, Jawa Barat.

Acara Parlemen Remaja yang dihelat setiap tahun ini, merupakan bagian dari pendidikan politik bagi generasi muda. Dan Parlemen Remaja 2016 kali ini mengambil tema DPR RI Menuju Parlemen Modern. Acara dihelat di Bogor dan Jakarta, 7-11 November 2016. ■

(mb), Foto: Anik/hr

Ketua DPR RI Hadiri Penganugerahan Gelar Pahlawan 2016

Ketua DPR RI Dr. H. Ade Komarudin, M.H. menghadiri acara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional pada Rabu, (9/11) di Istana Negara, Jakarta Pusat. Pada penganugerahan tersebut, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Alm. KH Raden As'ad Syamsul Arifin.

Ade Komarudin menegaskan dalam proses berjalannya sebuah bangsa, peran pahlawan memiliki arti yang sangat penting, sehingga jasa-jasa yang telah diberikan bagi sejarah Indonesia haruslah dihormati. "Ya, yang pasti jasa pahlawan harus kita hormati," tuturnya.

Penganugerahan gelar pahlawan kepada Alm. KH Raden As'ad Syamsul Arifin berdasarkan Keppres Nomor 90/TK/Tahun 2016 tertanggal 3 November 2016. Selain itu, Keppres No

91/TK/Tahun 2016, Presiden Jokowi juga telah menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputera Utama kepada Alm. Letnan Kolonel Inf Mohammad Sroedji dan Alm Mayor Jenderal Andi Mattalatta.

Berdasarkan Keppres, dianugerahkannya KH As'ad sebagai Pahlawan Nasional atas pertimbangan bahwa semasa hidupnya berjasa dalam memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lain untuk

merebut, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Penghargaan ini secara resmi langsung diserahkan kepada Jokowi kepada masing-masing keluarga atau perwakilan dari penerima gelar tersebut.

Dalam kesempatan ini, Ade Komarudin menjelaskan sosok pahlawan yang telah berjasa bagi Indonesia dalam mengusir penjajah jaman dahulu perlu dijadikan api semangat bagi generasi



Ketua DPR RI Ade Komarudin menghadiri acara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional di Istana Negara

saat ini. Menurutnya, era sekarang berbeda dari era sebelumnya, jika zaman dahulu pahlawan diidentifikasi sebagai orang yang berperan dalam mengusir penjajah, maka jika dikontekstualisasikan dengan kondisi sekarang, pahlawan adalah orang berprestasi yang mengabdikannya pada negara ini.

"Pahlawan pada era sekarang berbeda dengan era sebelumnya. Yang penting sekarang adalah prestasi kita, bagaimana mengabdikan pada negara ini. Itulah pahlawan sejati sekarang ini," jelas Akom.

Acara penganugerahan pahlawan ini juga dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, para Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Suhardi Alius. ■

(b.s.m.p.), Foto: Antri/br

Ketua DPR RI dan Dubes Belanda Bahas Kunjungan PM Mark Rutte

Ketua DPR RI Ade Komarudin didampingi Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno menerima kunjungan Duta Besar Belanda Rob Swartbol di Ruang Tamu Ketua DPR RI Gedung Nusantara III, Selasa (8/11). Pertemuan ini membicarakan rencana kedatangan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte ke Indonesia untuk menemui Presiden Joko Widodo dan kedatangannya ke Komplek Parlemen MPR, DPR, dan DPD RI.

Dalam pembicaraan itu, Ketua DPR RI dan Dubes Belanda, Rob Swartbol menyampaikan permohonan agar PM Belanda diberikan izin, ruang dan waktu, berpidato di hadapan para Anggota Legislatif Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Akom, sapaan akrab Ketua DPR RI menyambut baik.

"Pada prinsipnya saya menyambut baik dan sangat senang, bila Perdana Menteri Belanda akan menyampaikan pidatonya di depan Sidang Paripurna, mungkin sidang paripurna luar biasa, dengan topik khusus mendengarkan pidato beliau," jelas Akom.

Terkait dengan maksud PM Belanda yang akan berkunjung dan berpidato di hadapan para Anggota Dewan, Akom akan membahas hal tersebut saat rapat dengan para Pimpinan Fraksi dan Pimpinan DPR RI lainnya.

"Saya akan sampaikan ini pada rapat pengganti Bamus, dengan pimpinan fraksi, dan pimpinan lain. Insya Allah teman-teman tidak ada masalah. Sangat baik kerjasama kedua negara," papar Akom.

Menurut Akom, rencana kedatangan PM Belanda ke Indonesia sebagai kunjungan balasan Presiden Joko Widodo ke Belanda pada April



Ketua DPR RI Ade Komarudin berjabat tangan dengan Dubes Belanda

2016 lalu. Menyangkut kerjasama lanjutan yang sudah diputuskan dalam MoU oleh Presiden Jokowi dengan PM Belanda.

"Menyangkut kerjasama lanjutan yang sudah diteken MoU oleh Presiden Jokowi, saat berkunjung ke sana, antara lain bidang maritim, pembangunan air, di sekitar Jakarta, yang memang Belanda punya pengalaman di bidang itu," ungkap Akom.

Mengenai waktu kunjungan, belum ditentukan secara pasti, namun Akom

menyampaikan, akan disesuaikan saat tidak pada masa reses. Teknis kunjungan kenegaraan akan diurus oleh Sekretariat Jenderal DPR RI bersama dengan Duta Besar Belanda.

Duta Besar Belanda Rob Swartbol menyampaikan kunjungan PM Belanda akan didampingi para menteri dengan sekitar 20 pebisnis membahas soal maritim, infrastruktur, perairan, hotikultural dan hukum. "Saya senang sekali Pak Ketua memberi waktu untuk menjalin koordinasi," ujarnya. ■

(d.komp.), Foto: Rumi/br

Demo 4 November Bukan Kudeta Yang Gagal

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menegaskan bahwa demo pada Jumat, 4 November atau 411, yang berakhir rusuh itu bukan 'kudeta yang gagal'. Karena memang bukan untuk meng kudeta Presiden RI. Demo 411 itu hanya merupakan gerakan massa, yang marah karena pemerintah dianggap lambat dan cenderung melindungi kasus Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang diduga melakukan penistaan agama.

“ Jadi tidak benar kalau kudeta. Selama TNI tidak sepakat, maka tak ada yang namanya kudeta. Seperti di Thailand, Mesir, Turki, Philipina dan lain-lain. Maka, Presiden Jokowi jangan menggunakan terminologi Orde Baru. Demo 411 itu juga tak bisa yang menunggangi, sehingga kalau tidak ada bukti-bukti yang kuat untuk menjatuhkan Presiden RI, maka jangan bilang ditunggangi," tegas Fahri Hamzah saat diskusi dialektika demokrasi "Siapa Aktor Demo 411" bersama Direktur Eksekutif Indo Barometer Mohammad Qodari di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (8/11).

Sebaliknya Fahri menilai Presiden Jokowi yang ditunggangi, karena dalam proses hukum terhadap Ahok lambat. Tapi, pihaknya tidak akan menanggapi tuduhan tunggangan politik tersebut kalau belum definitif. "Kalau tuduhan itu definitif, baru saya akan tanggap. Jangan sampai presiden menerima informasi dari sumber yang tidak jelas," ujarnya.

Fahri pun mengakui jika dirinya sudah biasa menghadiri undangan demo dimana pun. Bahkan pernah diundang demo di Solo, NTB, dan Jakarta. Dalam demokrasi itu biasa. Prosedurnya diatur, maka kalau gejer dengan demo 411 itu berarti pemain baru. "Siapa yang memulai? Jeda sebelum aksi itu cukup panjang karena Ahok tidak segera diproses hukum. Puncaknya eskalasi massa di 411, sampai MUI berfatwa. Jadi, negara dan agama harus dikelola secara harmoni," tambahnya.

Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Qodari menanyakan kenapa Jokowi bertemu NU dan Muhammadiyah? Karena sebagai ormas keagamaan terbesar tidak turun demo 411 tersebut. Sementara Fahri Hamzah satu mobil dengan Habib Rizieq, Haidar Nasir, Zaitun dan lain-lain. "Idealnya kalau tidak cocok dengan situasi, pimpinan DPR RI itu tetap satu mobil dengan Said Aqil Siradj dan Haidar Nasir," katanya.

Yang pasti kata Qodari demo 411 tersebut membawa empat kepentingan sekaligus, yaitu pertama, tersinggung dengan pernyataan Ahok terkait surat Al-maidah 51.

Kedua, kaum miskin kota yang terdampak akibat kebijakan Ahok di Jakarta. Ketiga, untuk jatuhkan elektabilitas Ahok dalam Pilkada. Apalagi Bachtiar Nasir selalu bilang Jokowi menciptakan pemimpin kafir di Solo, dan juga di Jakarta. "Habib Rizieq pun menyebut Wiranto menjadi Wiranti karena Hanura mengusung Ahok dalam Pilkada DKI," tambahnya.

Keempat, adalah kepentingan lawan-lawan politik Jokowi-JK agar elektabilitas pemerintahannya turun. Khawatirnya lagi menurut Qodari, kalau kondisinya kritis dalam demo 411 tersebut bisa disusupi ISIS.

Untuk itu dia meminta kita hati-hati dan tidak menyepelekan aksi-aksi besar yang bisa disusupi ISIS. "Kita harus belajar dari Timur Tengah. Kini Irak, Iran, Suriah, Mesir, Pakistan, Afghanistan, bahkan Saudi Arabia dll dibuat hancur dengan ISIS. Penduduk negara tersebut mengungsi sampai tenggelam di laut, atau mati akibat bom dan lainnya," jelasnya.

Karena itu Qodari meminta kita hati-hati dan harus menjaga Indonesia yang majemuk ini sebagai keajaiban Allah SWT. Bahwa Ahok memang salah karena buruk dalam memilih diksi atau kosa-kata dalam berucap surat Al-maidah 51, dan itulah kelemahannya. "Memang tidak ada



Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra, Fahri Hamzah

yang sempurna dalam setiap orang, untuk itu pula tidak ada yang perlu dibela," pungkasnya. ■

(60), Foto: Arief/br



Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam, Fadli Zon

Agus Hermanto Pimpin Acara Tabur Bunga di Teluk Jakarta

Peringatan Hari Pahlawan yang diperingati setiap tanggal 10 November pada hakekatnya merupakan salah satu bentuk penghargaan atas jasa dan pengorbanan para pahlawan dan pejuang yang telah mengabdikan hidupnya demi utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada peringatan Hari pahlawan tahun 2016 ini, Wakil Ketua DPR RI Korinbang Agus Hermanto bertindak selaku Inspektur Upacara pada acara tabur bunga di laut perairan Teluk Jakarta, Kamis, (10/11).



Wakil Ketua DPR RI bidang Korinbang, Agus Hermanto menabur bunga di Laut perairan Teluk Jakarta

“ Acara tabur bunga yang sudah kita laksanakan mengangkat tema "Satukan Langkah Untuk Negeri". Kita harus mengingat betul jasa para pahlawan, dan kita mendoakan agar arwah para pahlawan yang telah gugur khususnya pahlawan perang 10 November di Surabaya, diterima sesuai dengan amal dan ibadahnya oleh Allah SWT," ucap Agus Hermanto usai acara tabur bunga tersebut diatas geladak KRI Surabaya.

Ia juga menyampaikan, apa yang telah

diperjuangkan para pahlawan dan pejuang untuk membela dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia kiranya dapat menggugah bangsa Indonesia untuk bersatu padu menyatukan langkah membangun negeri sebagaimana yang dicita-citakan para pendahulu negeri hingga kita dapat berdiri sejajar dengan negara-negara lain di dunia dan tidak dipandang sebelah mata.

"Kita sebagai generasi penerus bangsa, harus meneladani sikap dan

memahami makna semangat juang dari para pahlawan tersebut, serta meneruskan cita-cita perjuangan yang telah mereka lakukan bagi negeri ini," tuturnya.

Upacara Tabur Bunga di Laut, dalam rangka memperingati Hari pahlawan itu berlangsung dengan khidmat, tertib dan sederhana. Salah satu kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah mengheningkan cipta secara serentak di seluruh Indonesia selama 60 detik yang dimulai pada pukul 08.15 WIB.■

(dep.mp)/fotoanugrahi/riw.

Fadli Zon Awasi Jalannya Penegakan Hukum di Indonesia

Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam, Fadli Zon didampingi Wakil Ketua DPR RI Korkesra Fahri Hamzah dan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid, menghadiri aksi damai yang digelar pada tanggal 4 November 2016. Hal itu dikatakannya pada jumpa pers di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jum'at (04/11).

“ Pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2016, para delegasi dari para Ulama, Kyai dan tokoh masyarakat dan Pimpinan Ormas yang hadir, meminta kami untuk datang bergabung bersama elemen rakyat yang melakukan demonstrasi, terkait dengan usaha penegakan hukum," ujar Fadli.

Ia juga mengatakan, salah satu fungsi DPR RI adalah pengawasan, sebagai Wakil Ketua bidang

Korpolkam, dirinya ikut mengawasi apa yang terjadi dalam penegakan hukum. Ia melihat ada persoalan penegakan hukum yang dirasakan oleh sebagian masyarakat tidak adil.

"Ada kasus penistaan agama yang sudah menjadi konsen bukan hanya di Jakarta, tetapi di seluruh Indonesia, melibatkan jutaan orang yang merasa terganggu dengan pernyataan salah satu pejabat negara, namun belum ada proses hukum," paparnya.

Menurutnya, sumber dari segala masalah ini hanya satu orang saja, oleh karena itu harus ada proses hukum. Karena yurisprudensinya sudah sangat banyak. Para aparat penegak hukum tidak menegakkan hukum secara wajar.

"Kita tidak ingin ada suatu kejahatan karena adanya pembicaraan dalam penegakan hukum. Karena konstitusi kita mengatakan, bahwa kita memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Permasalahan ini tidak akan ada, kalau penegakan hukum berjalan dengan adil, wajar dan lumrah. Oleh karenanya banyak elemen masyarakat yang menilai bahwa proses penegakan hukum di Republik Indonesia tidak berjalan dengan wajar terkait masalah tersebut," tegasnya.■

(dep.mp), Foto: Ryan/br

Lembaga Pendidikan Harus Cetak Generasi Profesional Siap Kerja

Guna menghadapi persaingan industri yang semakin masif, Ketua DPR RI Ade Komarudin mewanti-wanti agar kurikulum pendidikan mampu mencetak generasi yang profesional dan unggul. Menurutnya kurikulum pendidikan yang tidak mampu menerjemahkan kebutuhan zaman hanya mencetak pengangguran baru.

Pernyataan tersebut dia sampaikan saat memberi sambutan di acara Peletakan Batu Pertama Pembangunan Pesantren tahap II (lanjutan) SMP dan SMK Multimedia dan Panti Yatim Berprestasi Yayasan Benteng Madani, di Purwakarta, Sabtu (5/11).

"Jangan sampai pendidikan malah membuat menganggur, tidak siap masuk dunia kerja, karena secara profesional diragukan. Kita akan kaji dengan benar kebutuhan pasar itu," jelas Akom, sapaan akrab Ketua DPR RI.

Akom menjabarkan, Kabupaten Purwakarta memiliki potensi yang besar, di daerah ini banyak perusahaan dan investor asing, di antaranya Korea, Jepang, India dan sebagainya. Tidak mau menyalahkan potensi tersebut, Akom yang terpilih dari daerah pemilihan setempat memanfaatkan peluang dengan mencetak SDM lokal dengan keterampilan yang dibutuhkan industri.

"Karena kita akan kerjasama dengan para investor itu dengan pabrik-pabrik, sesuai dengan kebutuhan mereka. Kita lebih memilih kebutuhan pasar apa," jelas Akom.

Sekolah yang dibangun Akom dan keluarga bekerja sama dengan para rekan-rekannya adalah lembaga pendidikan vokasional yang berbasis pada tradisi pesantren. Pendidikan vokasional merupakan penggabungan antara teori dan praktik secara seimbang dengan orientasi pada kesiapan kerja lulusannya. Kurikulum dalam pendidikan vokasional, terkonsentrasi pada sistem pembelajaran keahlian (apprenticeship of learning) pada kejuruan-kejuruan khusus (specific trades).

"Pendidikan vokasional tetapi berbasis pesantren, dan bagi yatim tentu tidak dipungut bayaran sampai sekolah menengah atas kejuruan. Diajarkan juga bahasa sesuai kebutuhan, bahasa Korea

harus, karena investor Korea cukup banyak, kemudian juga Jepang, bahasa Inggris tentu harus, dan juga Arab, karena itu pesantren," papar Akom.

Saat acara peletakan batu pertama, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi

juga turut serta menghadiri acara tersebut, dia menjelaskan saat ini mayoritas masyarakat purwakarta adalah kelas menengah. Hal ini ditopang dengan potensi perindustrian yang ada di Purwakarta.

Senada dengan Akom, Dedi pun akan mencetak dan mendukung sistem pendidikan yang menguatkan aplikasi. Menurutnya, teori dalam sekolah kejuruan cukup dua tahun saja, selepas itu aplikasi lewat magang. Dia akan menjadikan industri yang ada di Purwakarta menjadi tempat magang para siswa.

Dedi pun berpesan agar pembangunan sekolah memperhatikan aspek lingkungan. "Ini prinsip. Agama mengajarkan sinergitas



Ketua DPR RI Ade Komarudin meletakkan batu pertama pembangunan pesantren SMP dan SMK Multimedia di Purwakarta

manusia dengan alam," ujarnya.

Akom juga menyampaikan pembangunan sekolah ini tidak berdasar pada motif pendidikan yang mencari untung dari peserta didik, ini semata-mata diniatkan sebagai amal jariah. "Ini bukan investasi dunia, ini investasi akhirat. Di dunia sudah cukuplah seperti ini tidak akan ada puasnya. Kita investasi amal, tidak motif lain," paparnya. ■

(foto: mp), Foto: Antri/br

DPR RI akan Panggil BNP2TKI Terkait Tewasnya 54 TKI Dalam Insiden Kapal Tenggelam

Insiden kapal tenggelam di perairan Nongsa, Batam, Kepulauan Riau yang mengangkut TKI dan menyebabkan 54 meninggal menjadi perhatian komisi IX. Usai Reses Komisi IX DPR RI akan memanggil Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid

Dewan Minta Pemda Informasikan Bila Belum Terima Bantuan

Anggota Komisi X DPR RI Mujib Rohmat meminta kepada Pemerintah Daerah yang belum memperoleh bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk bidang pendidikan, agar segera menginformasikan ke Komisi X DPR.

“Kami minta kepada daerah yang belum mendapat bantuan dapat menginformasikan kepada kami (Komisi X DPR RI) agar dapat ditindaklanjuti,” seru Mujib, usai mengunjungi sejumlah sekolah di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Selasa (1/11).

Politisi Fraksi Partai Golkar itu mengatakan, pihaknya melihat sudah ada beberapa sekolah yang telah menerima bantuan untuk pembangunan gedung baru.

“SMAN 4 Kota Palu telah mendapatkan bantuan untuk pembangunan laboratorium seni dan saat ini sudah dibangun,” ungkap politisi asal dapil Jateng itu.

Sementara itu, dalam kunjungan ke SMPN 14 Palu, Anggota Komisi X DPR RI Marlinda Irwanti, mengapresiasi aktivitas sekolah ini. Ia juga memberi motivasi kepada para



Tim Kunker Komisi X DPR RI meninjau Sekolah se-Provinsi Sulteng

siswanya untuk meningkatkan keterampilannya. Politisi F-PG itu juga mendesak SMPN 14 Palu untuk meningkatkan kualitas pendidikannya, terutama bidang keterampilan.

Kepala SMPN 14 Palu Ramlan M. Siri menyampaikan di hadapan Tim Komisi X DPR RI, bahwa sarana dan prasarana sekolahnya banyak yang belum terwujud. Padahal, itu penting

untuk menunjang keterampilan para siswanya. Namun, banyak prestasi yang sudah diraih sekolah ini, khususnya di bidang keterampilan. Komisi X sangat mengapresiasi capaian prestasi sekolah tersebut.

“Kami merasa bahagia dan bersemangat sekali karena rombongan Anggota Komisi X dapat melihat langsung perkembangan serta kondisi sekolah kami. Kunjungan Komisi X ini, kami manfaatkan untuk banyak bertanya soal sarana dan prasarana sekolah demi menunjang keterampilan para siswa,” ujar Ramlah.

Kedatangan Tim Komisi X DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi Sutan Adil Hendra ke beberapa sekolah di Sulteng ini bertujuan untuk memantau sejumlah sekolah yang belum dan sudah mendapatkan dana bantuan dari anggaran negara. Kunjungan ini juga sekaligus untuk memantau perkembangan sekolah, khususnya di bidang keterampilan. ■

(br), foto : eka binu/br.

“Setelah masa reses selesai kita akan panggil BNP2TKI untuk meminta penjelasan atas langkah apa saja yang sudah dilakukan, karena selama penanganan korban itu, Kepala BNP2TKI Nusron Wahid tidak diketahui keberadaannya, padahal ini tanggung jawabnya,” ujar Anggota Komisi IX DPR RI Irgan Chairul Mahfiz, ketika dihubungi Parlemen, Jakarta, Senin (8/11).

Kondisi ini sangat disesali Irgan, BNP2TKI yang seharusnya menjadi lini sektor malah lambatnya dalam menindaklanjuti kasus tersebut. Sikap BNP2TKI dinilainya hanya membuat tumpukkan rasa kecewa bagi masyarakat.

“Peranan BNP2TKI belum maksimal hingga saat ini, Kepala BNP2TKI Nusron Wahid belum bergerak cepat dalam menanggapi insiden tersebut. Padahal, hal itu menyangkut tugas dan sumpah sebagai pejabat negara. Tugasnya juga jelas melindungi TKI mulai dari pemberangkatan hingga pemulangan,” pungkasnya.

Sekedar informasi, pada Rabu (2/11) lalu kapal kayu yang mengangkut para TKI itu berangkat dari Pelabuhan Johar Bahru, Malaysia menuju Batam, Kepri. Sesampai di Teluk Mergung Tanjung Bemban, Kecamatan Nongsa, Batam, kapal terbalik karena terhempas gelombang. ■



Anggota Komisi IX DPR RI Irgan Chairul Mahfiz

(rmi), Foto: Nisfurng/br

Komisi V Dorong Kalteng Bangun Bendungan

Dengan wilayah seluas satu setengah kali P. Jawa dan memiliki 11 sungai besar, maka Provinsi Kalimantan Tengah perlu segera dibangun bendungan. Selain bisa dimanfaatkan untuk sumber tenaga listrik (Pembangkit Listrik Tenaga Air-PLTA), juga berfungsi untuk pengairan dan penahan banjir.

“Intinya Komisi V DPR RI mendukung pembangunan bendungan tersebut apalagi proyek tersebut sudah dilakukan *study kelayakan*,” katanya baru-baru ini. Apalagi lanjut dia, Kalteng dalam hal produksi beras masih perlu ditingkatkan sehingga bisa mewujudkan swasembada pangan.

Rencana pembangunan bendungan yang terletak di Muara Juloi di Kabupaten Murung Raya, hulunya Barito dan sudah pada tahap *feasibility study* (FS). “Kami berharap lebih didorong dan dimajukan lagi sehingga bisa terwujud,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kalteng Leonard Samuel Ampung kepada Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI.

Ditambahkan Lasarus, di wilayah Kalteng terdapat 11 sungai besar sehingga untuk menciptakan swasembada pangan memerlukan lahan pertanian yang luas dan irigasi serta suplai air yang cukup. Selain pertanian, manfaat bendungan tersebut juga bisa untuk mengembangkan perikanan. “Di Muara Juloi sudah FS tentu akan kita dorong, begitu *detail engineering design* (DED) selesai langsung bisa dianggarkan. Kami



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Lasarus memberikan cenderamata kepada Gubernur Kalteng

jamin Komisi V akan dorong,” tandas politisi PDI Perjuangan Dapil Kalbar ini.

Berdasarkan informasi dari Dirjen Sumber Daya Air KemenPU-PR, potensi listrik dari bendungan tersebut cukup besar, paling tidak bisa mengcover kebutuhan listrik di Provinsi Kalteng bahkan bisa membantu Provinsi Kalsel dan sebagian Kaltim.

Rencana pengembangan Bendungan Serbaguna “Muara Juloi” memanfaatkan air Sungai Busang dan Sungai Juloi, yang

berasal dari Pegunungan Muller dan Schwaner. Air Sungai Busang mengalir dari arah Utara ke arah Selatan dan akan bertemu dengan Sungai Juloi yang mengalir dari arah Barat ke arah Timur. Kedua sungai ini bertemu dengan Sungai Murung di Desa Muara Juloi dan mengalir ke

Sungai Barito.

Sungai Barito yang mengalir dari Utara ke arah Selatan melalui kota-kota di sepanjang sungainya dari Purukcahu (Kalteng) sampai Kota Banjarmasin (Kalsel).

Banjir hampir terjadi setiap tahun di kota Purukcahu, Muara Teweh dan Buntok akibat debit air Sungai Barito yang tidak terkendali. Selain itu krisis tenaga listrik di Pulau Kalimantan, khususnya Provinsi Kalimantan Tengah yang kebutuhan tenaga listriknya diperkirakan sebesar 282.4 MW pada tahun 2018. ■

(mp). Foto: Maatun/hr

Demokrasi Saat ini Hasil Perjuangan Para Pahlawan

Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyas Titi Swasanany mengatakan peringatan hari pahlawan yang jatuh setiap 10 November merupakan momentum untuk mengingat perjuangan para pahlawan bangsa membela Tanah Air. Menurutnya, proses berdemokrasi yang kita nikmati saat ini, merupakan salah satu hasil perjuangan para pahlawan bangsa.

“Semua pengorbanan diberikan oleh para pahlawan kita. Harta, tenaga, pikiran dan nyawa. Peringatan hari ini terkait dengan proses demokrasi yang 4 November lalu kita laksanakan. Semoga, ke depan kita lebih memahami keikhlasan, perjuangan



Sekjen DPR RI Winantuningtyas Titi Swasanany

Mitra Kerja Komisi III Keluhkan Minimnya Fasilitas di Bengkulu

Komisi III DPR RI menerima keluhan terkait minimnya fasilitas mitra kerjanya di Provinsi Bengkulu. Hal tersebut terungkap dalam kunjungan kerja Komisi III DPR RI ke Bengkulu, baru-baru ini.

Dikatakan Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Benny K Harman yang menjadi Ketua Tim Kunjungan kerja Komisi III ke Bengkulu, pihaknya telah mendapat informasi terkait kondisi kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bengkulu yang dapat dikategorikan darurat. tersebut menjadi sangat memprihatinkan ketika pada kenyataannya penyalahgunaan dan peredaran narkotika di daerah tersebut tergolong tinggi. Sehingga untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya BNNP sejatinya harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Salah satunya dengan fasilitas kantor BNNP yang cukup representatif.

"Kantor BNNP Bengkulu sudah menjadi perhatian kami juga. Kami akan memperjuangkan pembangunan kantor BNNP Bengkulu. Mudah-mudahan kalau anggaran mencukupi, tahun depan bisa dianggarkan. Tapi prinsipnya secepatnya kantor tersebut harus dibangun," ujar politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini.

Selain kantor BNNP Bengkulu, Komisi III DPR RI juga menerima permohonan dari Kepala Pengadilan

dan semangat dari pahlawan untuk membangun persatuan dan kesatuan bangsa," ungkap Win, sapaan akrab Sekjen DPR RI, usai mengikuti upacara bendera memperingati Hari Pahlawan di Gedung Setjen DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (10/11).

Lebih lanjut, ia menyampaikan momentum ini sebaiknya tidak dipandang sebagai kegiatan rutinas semata, melainkan untuk memaknai bagaimana perjuangan para pahlawan dalam meraih kemerdekaan.

Dalam hal ini, diungkapkan Win, Kesetjen DPR RI memaknai jasa para pejuang dengan meningkatkan kapasitas SDM dari berbagai aspek, baik *soft*



Wakil Ketua Komisi III Benny K Harman dan Anggota Komisi III DPR RI Tifatul Sembiring

Negeri Kepahiang, Bengkulu tentang penyediaan pusat rehabilitasi bagi anak pelaku pelecehan seksual. Pasalnya selama ini di Bengkulu belum ada pusat rehabilitasi bagi pelaku pelecehan seksual. Sehingga untuk menjalankan vonis rehabilitasi bagi pelaku, pengadilan negeri Kepahiang harus mengirim ke provinsi terdekat, yakni Jambi. Kenyataan itu cukup memakan anggaran yang tidak sedikit.

Terkait hal itu, anggota Komisi III

kompetensi maupun *hard* kompetensi. Tidak hanya terkait dengan pendidikan seperti penjenjangan, tetapi juga menambah wawasan dan perubahan *mindset* untuk penguatan semangat nasionalisme.

"Semangat para pahlawan memotivasi kita untuk terus berkarya dan bekerja bagi bangsa dan negara. Bahwa kita merupakan bagian dari negara yang ikut bertanggung-jawab penuh terhadap eksistensi bangsa dan kemajuan bangsa ini," ungkap Win.

Selain itu, sambungnya, peringatan hari pahlawan ini juga bersamaan dengan acara Parlemen Remaja 2016. Sebanyak 136 pelajar terpilih tingkat menengah atas (SMA, SMK dan MA) dari seluruh

DPR RI, Tifatul Sembiring mengatakan bahwa pihaknya mendukung dan akan mendorong mitra kerjanya, Kementerian Hukum dan HAM untuk mendirikan pusat rehabilitasi bagi anak pelaku pelecehan seksual di Bengkulu. Hal ini semata untuk dapat menjalankan putusan atau vonis pengadilan yang menyatakan bahwa anak pelaku pelecehan seksual harus mendapatkan rehabilitasi mental, namun dengan anggaran yang memadai. ■

Indonesia mengikuti kegiatan yang dihelat setiap tahun ini.

Menurut Win, acara ini merupakan bagian dari pendidikan politik bagi generasi muda bangsa. Melalui acara ini, para peserta diberikan kesempatan untuk mempelajari proses kerja dewan dan pemahaman lebih tentang DPR RI. Diharapkan, nantinya para generasi muda yang berprestasi tidak takut untuk terjun ke dalam dunia politik.

"Peserta Parlemen Remaja merupakan pilihan melalui proses seleksi, jadi ini adalah potensi untuk bangsa ke depan. Calon pemimpin bangsa yang memiliki kualitas," tandasnya. ■

(ayu), Foto: Ayo/br

(annmp), Foto: Ayo/br

Polda dan BNNP Harus Bersinergi Tuntaskan Narkoba

Anggota Komisi III DPR RI Supratman Andi Agtas meminta jajaran Kepolisian Daerah (Polda) dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Tengah bersinergi dalam menuntaskan kasus narkoba yang masih marak di Kalteng.

“ Kami meminta jajaran Polda dan BNNP bekerja sama dalam memberantas narkoba, minimal melakukan koreksi internal terhadap penegakan hukum,” kata politisi F-Gerindra saat rapat kerja dengan Kapolda dan BNNP Kalteng dalam kunjungan kerja (Kunker)

Komisi III DPR RI, baru - baru ini.

Lebih lanjut, Supratman mengatakan, dengan anggaran yang minim kedua lembaga tersebut harus b i j a k dalam

mengelola dan memberdayakannya. “Minimnya anggaran bukanlah suatu persoalan yang harus dijadikan kendala,” ujarnya.

Di tempat yang sama Anggota Komisi III Daeng Muhammad mempertanyakan terkait rendahnya pengawasan terhadap narapidana (Napi) narkoba di lembaga pemasyarakatan (Lapas). Peralnya, masih banyak ditemukan adanya transaksi peredaran narkoba di dalam Lapas.

“Bisa dibayangkan, di Lapas Kelas II A Palangkaraya terdapat 500 lebih napi. Namun, pengawasannya hanya dilakukan oleh 7 orang. Bagaimana mungkin bisa melakukan pengawasan secara efektif kepada para napi dan napi narkoba kalau daya dukung kurang,” ungkapnya.

Daeng menilai, kurangnya jumlah personil dan sumber daya manusia (SDM)

untuk pengawas terlatih merupakan persoalan paling mendasar terjadinya penyusupan narkoba di dalam Lapas yang hingga kini masih sulit diantisipasi. “Saya yakin betul dari total 7 orang pengawas yang terlatih hanya 2-3 orang. Ini menjadi persoalan. Ke depan, harusnya ada pendidikan khusus terhadap pengawasan di dalam lapas,” harapnya.

Lebih lanjut, politisi asal dapil Jawa Barat itu menjelaskan, ada empat poin utama yang harus dilakukan pemerintah dalam menunjang keberhasilan penegakkan hukum di Indonesia. Pertama, niat baik pemerintah. Kedua, pembangunan SDM yang terlatih dan memadai. Ketiga, strategi akselerasi percepatan. Dan keempat, keberpihakan pemerintah terhadap sektor anggaran. “Menurut saya, jika keempat hal itu tidak dijalankan, penegakan hukum di Indonesia tidak akan optimal,” tutupnya. ■



Anggota Komisi III DPR RI Supratman Andi Agtas

Pemerintah Harus Lebih Serius Tangani Tata Ruang Kota

Sejak 8 November 2008 silam, Pemerintah telah menetapkan tanggal tersebut sebagai Hari Tata Ruang Nasional. Peringatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat tentang pentingnya penataan ruang dan mensosialisasi berbagai kebijakan Pemerintah di bidang penataan ruang, baik di pusat maupun di daerah.

Disadari, penataan ruang di Indonesia masih banyak kendala. Menurut Anggota Komisi II DPR RI Hetifah, penataan ruang seringkali dilakukan tanpa data dan informasi yang lengkap dan akurat, serta tanpa partisipasi masyarakat yang bermakna.

“Saya melihat banyak sekali masalah-masalah tata ruang kita, sehingga tata ruang tidak mampu mengantisipasi perkembangan zaman. Selain itu juga peran pemangku kepentingan dalam penyusunan rencana tata ruang kurang maksimal, sehingga banyak kepentingan masyarakat, khususnya mereka yang miskin dan marjinal, yang tidak terakomodir dalam Rencana Tata Ruang”, ujar Hetifah dalam rilis yang diterima

Parlementaria pada Selasa, (08/11).

Hetifah mengingatkan bahwa Indonesia telah memiliki UU yang mengatur tata ruang, sehingga harus berpedoman pada regulasi tersebut. “UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang jelas mengatur bahwa penataan ruang harus memperhatikan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan. Tapi yang kita lihat sekarang penataan ruang tidak sepenuhnya dilakukan sesuai amanat UU tersebut”, kata Hetifah.

Lebih lanjut ditegaskan, semangat penataan ruang sejatinya untuk



Anggota Komisi II DPR RI Hetifah

menghadirkan rasa aman dan kepastian hukum, sehingga pembangunan untuk kepentingan publik bisa berjalan, investasi dan pertumbuhan ekonomi terjadi, kesejahteraan dan keadilanpun dapat dicapai. Ia pun berharap pemerintah dapat lebih fokus dan serius menghadirkan tata ruang nusantara yang berdaulat, sejahtera dan adil.

“Pada kesempatan Peringatan Hari Tata Ruang kali ini, saya berharap pemerintah memberi perhatian lebih serius untuk menghadirkan tata ruang nusantara yang berdaulat,menyejahterakan dan berkeadilan,” tutupnya. ■

Komisi X Dukung Gubernur Sulut Tingkatkan Pariwisata Daerahnya

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Utut Adianto mendorong peningkatan pariwisata di Provinsi Sulawesi Utara. Hal tersebut dikemukakan dalam kunjungan kerja Komisi X ke Sulut, baru-baru ini.

“ Saya melihat ada potensi besar di sektor Pariwisata daerah ini. Tidak hanya Bunaken, namun seperti yang tadi kita lihat, Selat Lembeh juga sangat berpotensi untuk dijadikan wisata unggulan daerah ini. Namun sayangnya selama ini belum terekspose dengan baik,” ujar Utut.

Meski demikian, lanjut Utut, dengan kreatifitas dari Gubernur berhasil meningkatkan wisatawan. Dalam waktu dua setengah bulan mampu mendatangkan sekitar tiga puluh ribu turis baru asal China. Hal ini menurut Utut sebuah prestasi tersendiri dari gubernur.

"Ada strategi khusus dari gubernur untuk mendorong sektor pariwisata daerahnya. Kelebihan apa saja yang ada



Tim Kunker Komisi X saat meninjau Selat Lembeh

di Sulut, ada pantai, gunung, kultur yang juga terbuka, tidak anti suku tertentu, ini sangat disadari sekali oleh gubernur. Sekarang bagaimana agar upaya gubernur untuk meningkatkan sektor pariwisata didaerahnya tersebut dapat terus berjalan dengan baik. Kami di DPR RI tentu akan terus mendorong hal tersebut lewat

peningkatan anggaran pariwisata, terutama untuk destinasi wisata baru," ungkapnya.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi X DPR RI yang menjadi Ketua Tim, Ferdiansyah menilai untuk meningkatkan sektor pariwisata juga harus didukung dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Hal tersebut juga harus disiapkan sejak dini. Peningkatan SDM tentu tidak bisa terlepas dari bidang pendidikan tinggi.

"Bagi sektor pariwisata, penyiapan sumber daya manusia juga sangat penting. Hal ini terkait juga dengan dunia pendidikan tinggi. Penyiapan tentang SDM ini harus dilakukan secara sistematis dan bertahap dengan sangat matang. Dengan demikian ketika pengembangan fasilitas dan infrastruktur di sektor Pariwisata, SDM untuk sektor tersebut pun sudah siap mengiringi," pungkask Ferdi. ■

(Rajy), Foto: Rizka/br

Pelabuhan Dompok Terbengkalai, Pemerintah Harus Duduk Bersama

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia menekankan perlunya Pemerintah Daerah Kepulauan Riau duduk bersama Pemerintah Pusat (Kementerian Perhubungan) untuk mencari solusi bersama terkait penyelesaian pembangunan Pelabuhan Dompok yang sudah mencapai 95% dan hanya menyisakan pekerjaan finishing.

“ Hal tersebut dikemukakan Yudi saat Tim Kunker Reses Komisi V DPR RI melihat langsung kondisi Pelabuhan Dompok yang belum juga dioperasikan namun beberapa bagian sudah mengalami kerusakan di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, baru-baru ini.

"Pemda Kepri harus segera duduk bersama Pemerintah Pusat antara lain untuk menentukan siapa yang akan menjadi operator Pelabuhan Dompok Tanjung Pinang, Kepulauan Riau," pinta Yudi.

Politisi PKS ini juga menengarai tarik ulur Pemda Kepri dan Pemerintah Pusat (Kemenhub) dalam pengelolaan pelabuhan



Tim Kunker Komisi V DPR RI meninjau Pelabuhan Dompok di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau

(operator) diduga menjadi biang masalah terbengkalainya penyelesaian Pelabuhan Dompok yang sudah mencapai 95% lebih sehingga perlu

dicari jalan keluarnya sesegera mungkin.

Disinggung mengenai tarik ulurnya proses administrasi lahan di kawasan seluas 5 hektar tersebut, Bambang Wiyanto Direktur Kenavigasian Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub mengatakan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) diatas Rp5 miliar proses hibahnya harus melalui persetujuan DPRD Kepri.

"Kita tidak bisa melakukan keputusan secara sepihak. Karena memang harus melalui proses dan persetujuan dari DPRD Provinsi Kepri," jelas Bambang. Ia menambahkan ditundanya proses finishing pada Tahun Anggaran (TA) ini, merupakan dampak efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Namun diharapkan pada Tahun 2017 nanti Pelabuhan Dompok bisa diselesaikan pembangunannya.

Selain masalah pelabuhan, Yudi Widiana Adia juga menyoroti kebutuhan sekolah maritim di Kepulauan Riau. "Kepri ini 96 persen wilayahnya lautan dan hanya 4 persen daratan, sehingga perlu sarana dan prasarana pendidikan Kemaritiman yang lengkap," pungkask Yudi. ■

(Gij), Foto: Naefroj/br

Papua Butuh Program Percepatan Bidang Pendidikan

Anggota Komisi X DPR RI Dadang Rusdiana menilai, Provinsi Papua membutuhkan program percepatan pada bidang pendidikan. Dengan adanya Otonomi Khusus, ia meminta agar ada perlakuan khusus kepada Papua untuk mengejar ketertinggalan, khususnya pendidikan.

Demikian dikatakannya di sela-sela Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI ke Jayapura, Papua, baru-baru ini. Kunker yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih (F- PKS/dapil Jateng) ini mengunjungi sejumlah sekolah menengah atas di Jayapura, dan pertemuan dengan Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, beserta jajarannya.

"Kalau kita mendengar langsung keluhan para insan pendidikan di Papua, kita harus ada beberapa program percepatan di bidang pendidikan. Kita harus melihat bagaimana sarana prasarana, kekurangan guru, maupun hal lain yang belum memadai," kata Dadang.

Politisi F-Hanura itu menekankan, kedepannya Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Papua untuk memprioritaskan percepatan pembangunan infrastruktur maupun pengadaan Sumber Daya Manusia. Ia berharap, keterbatasan-keterbatasan baik itu aspek geografis maupun daya dukung geografis tidak menyurutkan Otsus untuk dijalankan.

Dadang pun berharap, anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN per tahunnya, baik itu yang diatur oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, mendapat perlakuan khusus ketika dialokasikan ke Papua.

"Yang diinginkan Pemerintah



Anggota Komisi X DPR RI Dadang Rusdiana bersama siswa SMA Negeri 5 di Jayapura

Papua termasuk Komisi X DPR RI, bagaimana anggaran pendidikan yang 20 persen itu bagi Papua ada perlakuan khusus. Seperti BOPTN, yang dirasakan tidak adil pembagiannya. Kemudian lulusan Beasiswa SM3T, yang dilanjutkan CPNS dan penempatan sesuai dengan daerah selama mahasiswa itu kontrak 3 tahun. Itu beberapa perbaikan yg diinginkan Pemerintah Papua, sehingga kita harus meresponnya," jelas Dadang.

Politisi asal dapil Jawa Barat itu menambahkan, kemauan Pemerintah Pusat dalam membantu ketertinggalan Papua sudah sangat terlihat. Namun memang dibutuhkan strategi-strategi yang tepat untuk mengejar

ketertinggalan itu.

"Pemerintah perlu mengambil kebijakan mana yang tepat untuk Papua, apakah infrastruktur, atau SDM, atau lainnya. Pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan yang tepat, dengan langsung melihat ke lapangan, bukan hanya dari Jakarta. Kalau terjun ke lapangan, kita tahu apa yang mereka butuhkan," jelas Dadang.

Politisi yang juga Anggota Badan Anggaran DPR RI itu pun melihat, tidak perlu ada payung hukum lagi untuk masalah perlakuan khusus kepada Papua. Adanya Otsus Papua, hal itu sudah mendukung. Dadang menekankan, yang dibutuhkan adalah ketajaman implementasi berbagai kebijakan program percepatan itu. ■

(6/1) Foto: Sofyan/br

Komisi VIII DPR RI Apresiasi Kerukunan Hidup Beragama di Maluku

Komisi VIII DPR RI memberikan apresiasi terhadap kerukunan hidup beragama di Provinsi Maluku. Pasalnya pasca konflik belasan tahun lalu yang melanda daerah ini, kini masyarakat Maluku hidup dalam kerukunan beragama yang mendapat acungan jempol, bahkan bisa dijadikan laboratorium kerukunan hidup beragama.

Anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Maluku Diah Pitaloka menanyakan inovasi-inovasi program apa yang dilakukan Pemerintah Provinsi Maluku dalam membina kerukunan umat beragama, karena menurutnya ini menjadi tantangan bagi demokrasi di Indonesia.

Pemerintah Diminta Bantu Lebih Banyak Lagi Kawasan Kumuh

Anggota Komisi V DPR RI Agati Sulie Mahyudin meminta pemerintah pusat khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk membantu penataan pemukiman kumuh kawasan Mendawai, Palangka Raya.

“Kalau berharap anggaran daerah tidak mungkin karena APBDnya kecil sekali. Karena itu kami berharap pemerintah pusat untuk membantu meningkatkan kualitas pemukiman daerah kumuh tersebut. Sekaligus dapat mengangkat mereka ke kehidupan yang lebih baik,” ujar Agati ketika bersama Tim Kunker Komisi V DPR RI mengunjungi kawasan Mendawai, Palangka Raya, baru-baru ini.

Politisi Golkar dari Dapil Kalteng ini mengatakan, di kawasan Mendawai seperti danau cocoknya untuk pengembangan keramba. Namun ada sekitar 1.000 rumah sudah dibangun perumahan dengan berbagai fasilitas yang terbatas. “Mereka sangat tidak layak untuk tinggal disana, selain bekas rawa juga tidak memenuhi kesehatan. Sementara jika dipindah sepertinya tidak mungkin sebab sudah tinggal turun temurun,” ungkap Agati.

Salah satu solusi adalah membantu



Tim Kunker Komisi V DPR RI mengunjungi kawasan pemukiman kumuh di Mendawai, Palangka Raya

mereka dengan merehab rumah dan memperbaiki infrastruktur serta membantu mereka dalam bidang perekonomian, kesehatan dan pendidikan. Ia menyambut baik di lokasi itu sudah ada PAUD, SD maupun SMP dengan harapan tidak ada lagi pemukiman kumuh. Tim Komisi V mengapresiasi pemerintah yang sudah melakukan peremajaan perumahan di lokasi ini.

Bahkan Ketua Tim Lasarus saat peninjauan ke lokasi ini berharap agar rumah-rumah yang tidak layak huni dari keluarga tidak mampu agar dilaporkan ke Kemen PU-PR cq Direktur Rumah Swadaya Dirjen Penyediaan Perumahan disertai data-data yang jelas agar dibantu secara cuma-cuma.

Satu lagi yang diharapkan Agati Sulie, dari dulu masyarakat Kalteng kerjanya berladang, nenek moyangnya berladang, namun kini ada larangan membakar lahan. “Saya setuju

larangan membakar lahan, karena tanah gambut sehingga terbakar sedikit akan menyebar luas. Namun perlu ada solusi agar larangan bakar lahan, tetapi masyarakat tetap bisa berladang. Kalau bisa dibantu alat-alat berat untuk menebang dan membersihkan lahan ada esvakator tanpa membakar lahan. Dengan demikian mereka bisa berladang sekaligus mempertahankan kehidupan mereka,” pungkas Agati Sulie. ■

“Saya senang bisa ke Maluku dan tentunya inovasi tentang kerukunan umat beragama ini menjadi tantangan sendiri di banyak wilayah dalam menyelenggarakan Pilkada,” katanya saat pertemuan tim yang dipimpin Achmad Mustaqim dengan Wakil Gubernur Maluku Zeth Sahuburua di Kantor Gubernur, Ambon, baru-baru ini.

S e n a d a
d e n g a n D i a h
d a l a m



Anggota Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka

kesempatan yang sama, Mohammad Iqbal Romzi (F-PKS) menyatakan Provinsi Maluku menjadi laboratorium pembinaan kerukunan umat beragama.

“Saya membayangkan untuk membuat rukun satu keluarga saja sulit, bagaimana dengan yang beragam suku, latar belakang social dan busaya yang berbeda,” paparnya.

Oleh karena itu, ia memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk prestasi ini. Sehingga nanti siapa saja yang ingin belajar tentang kerukunan bisa datang ke Maluku. “Walaupun sebagaimana diketahui ada ancaman dan sebagainya, mudah-mudahan tidak meluas sampai di sini,” tegasnya.

Ia juga ingin mengetahui proses yang begitu cepat dari tahun 1999 sampai menjadi seperti saat ini di Maluku.

“Kami sudah mengatakan kepada Menteri Agama agar betul-betul di

bina. Apapun alasannya bahwa kerukunan merupakan syarat mutlak terselenggaranya pembangunan baik fisik maupun mental,” tandas Romzi.

Mendapat apresiasi tersebut, Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Fesal Musaad yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, menyatakan pembangunan kerukunan umat beragama di Maluku dilakukan secara kolektif melalui peran Pemerintah Provinsi Maluku, Kanwil Kementerian Agama, dan tokoh masyarakat di daerah ini.

“Berkat kerjasama semua pihak, provinsi yang mendapat julukan negeri seribu pulau ini dinobatkan sebagai laboratorium kerukunan umat beragama di Indonesia, dan menjadi provinsi dengan tingkat kerukunan ketiga di Indonesia,” untkapnya. ■

(mp), Foto: Mastar/br

(es), Foto: Suci/br

Pengembangan Bandara RHF Kepri Terkendala Bukit

Pengembangan *runway* Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF) Tanjung Pinang Kepulauan Riau (Kepri) terkendala oleh kondisi geografis perbukitan yang harus diratakan mencapai 1,5 juta kubik sehingga butuh biaya besar.

Hal tersebut dikemukakan Anggota Komisi V DPR RI Sahat Silaban usai melakukan pertemuan dan mendengarkan ekpose dari jajaran Angkasa Pura II, Otoritas Bandara, BMKG dan Basarnas di ruang VIP Bandara RHF, baru-baru ini.

"Panjang *runway* Bandara RHF saat ini hanya sekitar 2000 meter dan masih butuh pengembangan hingga 2500 meter untuk bisa didarati pesawat berbadan besar," ungkap Sahat.

Politisi Nasdem ini menambahkan bahwa ada harapan kedepan Pulau Bintan menjadi salah satu destinasi wisata dunia, antara lain wisata golf di Lagoi yang sudah terkenal hingga ke mancanegara.

Daya tarik Pulau Bintan dan sekitarnya harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, antara lain pengembangan Bandara menjadi bertaraf internasional.

"Karena Bandara RHF dikelola oleh



Anggota Komisi V DPR RI Sabat Silaban

AP II dan ada ketentuan apabila *airport* sudah dikelola Badan Usaha maka pemerintah pusat tidak boleh lagi intervensi masalah pendanaan," terang Sahat.

Di daerah lain pengelolaan Bandara oleh AP II sudah banyak kemajuan cukup pesat sehingga politisi berdarah Medan ini mengharapkan hal tersebut bisa dilakukan di Bandara RHF sehingga target wisatawan 2 juta dapat tercapai selama 2 tahun kedepan.

Senada dengan Sahat, Anggota Komisi V DPR RI Bakri menyarankan agar pihak Angkasa Pura II bisa menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kepri untuk mencari solusi terkait pengembangan *runway* Bandara.

"Sebaiknya pihak AP II duduk bersama Pemda Kepri untuk menutup kekurangan anggaran pengembangan Bandara, apakah dianggarkan melalui APBD Pemda

Kepri, Pemkab Tanjung Pinang atau diajukan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)," saran Bakri.

Politisi PAN Dapil Jambi ini menegaskan Komisi V DPR RI akan membicarakan masalah ini dengan Kementerian terkait, agar pengembangan bandara jangan sampai terbengkalai terus sehingga target wisatawan tidak tercapai, mengingat potensi wisata Tanjung Pinang dan Kepulauan Bintan sangat besar. ■

(otj), Foto: Naejung/br

Dewan Tolak Menpora Batalkan PON Remaja 2017

Rencana pemerintah membatalkan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) Remaja 2017 di Jawa Tengah mendapat penolakan keras dari Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra. Pihaknya menyesalkan keputusan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang memandang keberadaannya hampir sama dengan Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas).

Sutan menilai, jika efisiensi anggaran menjadi alasan Kemenpora meniadakan event tersebut, hal itu menunjukkan dangkalnya pemahaman pemerintah tentang fungsi dan sasaran dari PON Remaja.

"Event ini penting untuk menghasilkan atlet potensial untuk level senior. Menpora terlalu memandang sempit PON Remaja dan POPNAS sebagai event yang sama," tegas Sutan, ketika dihubungi Parlemenaria via telepon, Selasa (8/11).

Menurut politisi Fraksi Partai Gerindra itu, dengan meniadakan PON Remaja, berarti akan ada kekosongan

pembinaan di level junior. Padahal, event ini juga berfungsi mempersiapkan atlet untuk diturunkan di Asian Youth Games dan Youth Olympic Games 2017. Sedangkan POPNAS lebih dipersiapkan untuk Asian School Games.

Untuk itu, politisi asal daerah pemilihan Jambi itu meminta kepada Menpora dalam memutuskan sesuatu melibatkan KONI pusat untuk memberi masukan dan pertimbangan. Ia meminta Menpora mendengarkan pandangan dari pihak lain, seperti KONI.

"Kita menilai ini akan menjadi kekosongan pembinaan antara level junior dan senior secara sistematis, apalagi

peniadaan PON Remaja lebih disebabkan alasan efisiensi dan waktu," imbuh politisi yang akrab dipanggil SAH itu.

Sebelumnya diketahui bahwa Kemenpora berencana membatalkan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) Remaja 2017 di Jawa Tengah karena alasan efisiensi anggaran. Kepala Komunikasi Publik Kemenpora, Gatot S Dewa Broto mengatakan, pihaknya harus memilih salah satu antara, PON Remaja dan Popnas.

Menurut Gatot, untuk memilih antara Popnas dengan PON Remaja ini pihaknya memang melakukan kajian sehingga diketahui keunggulan dan kelemahannya.

Hanya saja, hingga saat ini pihaknya belum memberikan keputusan resmi terkait pembatasan PON Remaja yang rencananya digelar Juni 2017.

Dipilihnya Popnas, kata dia, karena kejuaraan ini mempertandingkan cabang olahraga yang banyak dipertandingkan pada kejuaraan-kejuaraan internasional. Sedangkan untuk PON Remaja cabang olahraganya dinilai tidak terlalu signifikan untuk jenjang berikutnya.

"Memang semuanya ada plus minusnya. Tapi harus segera punya sikap terkait hal ini. Kami juga akan

mengirimkan surat ke Gubernur Jawa Tengah supaya persiapan yang dilakukan tidak terlalu jauh. Mumpung masih segini," jelas Gatot.

PON Remaja yang sebelumnya menjadi jenjang atlet mempertandingkan 23 cabang olahraga dan batasan usia atlet yang bisa turun dikejuaraan ini adalah 17 tahun. Sedangkan Popnas yang dijadwalkan digelar di Jawa Tengah, September 2017 mempertandingkan 20 cabang olahraga. ■



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra

Komisi VIII DPR RI Tinjau Kembali Pembangunan Asrama Haji Padang Pariaman

Komisi VIII DPR RI mendesak penyelesaian pembangunan Asrama Haji Embarkasi Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Hal tersebut terungkap dalam Kunjungan Kerja Komisi VIII ke Provinsi tersebut, baru-baru ini.

“Pembangunan Asrama Haji Embarkasi Padang Pariaman kita lihat masih seperti yang dulu, belum ada progress yang berarti,” ungkap Wakil Ketua Komisi VIII Deding Ishak disela-sela saat meninjau pembangunan Asrama Haji Embarkasi di Sungai Buluh, Batang Anai, Padang Pariaman.

Berdasarkan informasi yang diterimanya, lanjut Deding, pembangunan asrama ini terhenti, karena ada dua hal. Pertama, masalah hukum yang sekarang dalam proses penyelesaian dan kami minta perhatian dan tanggungjawab Satker disini Kanwil Kemenag. Kedua, terkait dengan RKA-K/L Kementerian Agama 2017. Saat rapat dengan Komisi VIII, Kemenag memutuskan untuk memasukkan program ini untuk dilaksanakan tahun 2017 mendatang.

Terkait adanya permasalahan antara rekanan dengan masyarakat Sungai Buluh dimana adanya kewajiban yang belum dipenuhi, Deding mengusulkan pertemuan antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah. Karena ia tidak menginginkan ada pihak yang dirugikan sehingga pembangunan bisa dilanjutkan. "Insya Allah, kita adakan



Tim Kunker Komisi VIII DPR RI meninjau pembangunan Asrama Haji Embarkasi di Sumatera Barat

pertemuan untuk mencari solusi sehingga pembangunan Asrama Haji Embarkasi Padang Pariaman ini tidak terganggu," tutupnya.

Sementara itu Bupati Padang Pariaman, Ali Mukhni mengatakan masalah tanah jalan yang belum terbayarkan sudah dianggarkan di anggaran tahun 2017. "Kami akan berjuang terus untuk kelanjutan pembangunan Asrama Haji ini dengan dukungan Komisi VIII DPR RI dan Gubernur Provinsi Sumbar, Irwan Prayitno," jelasnya.

Menurutnya, pembangunan Asrama Haji adalah marwah daerah Sumbar karena asrama haji yang berada di Tabing Padang tidak mampu lagi menampung ribuan jamaah haji setiap tahunnya. Apalagi tidak

ada lahan yang tersedia untuk pengembangan asrama haji, tambahannya.

Rencananya Asrama Haji Embarkasi Padang melayani sekitar enam ribu jamaah haji yang terdiri dari tiga provinsi, yaitu Sumatera Barat, Jambi dan Bengkulu. Sementara jamaah haji dari Sumbar mencapai 4.500 jamaah, Jambi 1.200 jamaah, dan Bengkulu sekitar 600 jamaah yang melalui Bandara Internasional Minangkabau (BIM) Padang Pariaman.

Kunjungan ini adalah yang kedua kalinya, sebelumnya Komisi VIII pada tanggal 22 April 2016 telah melakukan peninjauan ketempat tersebut.

Rombongan Tim Kunker Komisi VIII DPR RI dipimpin Wakil Ketua Deding Ishak, didampingi beberapa anggota lintas fraksi yakni Agus Susanto dan Itet Tridjajati Sumarijanto (F-PDIP), Zulfadhli (F-PG), Anda dan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (F-Gerindra), Linda Megawati (F-PD), Asli Chaidir (F-PAN), Bisri Romly (F-PKB), dan Samsudin Siregar (F-Hanura). ■

Komisi III Harapkan Pilkada Aceh Berjalan Damai

Pilkada serentak pada tahun 2017 diharapkan berjalan damai tanpa intimidasi di Banda Aceh. Pasalnya, pada pilkada sebelumnya banyak ditemukan intimidasi yang dilakukan oleh salah satu kandidat.

“ Saya menemukan intimidasi dari salah satu pasangan calon (paslon) yang memaksakan untuk memilih salah satu kandidat. Untuk itu, kami meminta Kapolda Aceh agar mengantisipasi hal itu,” kata Anggota Komisi III DPR RI Muslim Ayub saat pertemuan dengan Kapolda Aceh dan BNNP di Banda Aceh, baru-baru ini.

Politisi F-PAN ini, mengapresiasi kesiapan Kapolda dengan menambah 1.900 personel Brimob. Dengan begitu, aparat bisa menjangkau wilayah-wilayah terpencil.

"Saat bertemu dengan Kapolri, saya memang meminta untuk menambah pasukan, alhamdulillah sudah terealisasi. Kapolda juga sudah melakukan kombinasi pengamanan dengan melibatkan elemen masyarakat," ujar politisi Dapil Aceh ini.

Selain itu, lanjut Muslim, ia juga meminta agar partisipasi masyarakat dalam pengamanan Pilkada juga dibutuhkan.

Dalam kesempatan yang sama,



Anggota Komisi III DPR RI Muslim Ayub

Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Al Habsy menganalisa data yang menunjukkan ada sekitar delapan wilayah yang masih rawan konflik pada pagelaran Pilkada 2017 nanti.

"Saya telah mengingatkan Kapolda Aceh untuk mengamankan daerah-daerah tersebut. Dan perlu juga kerjasama dengan para tokoh masyarakat, tentara, KPU dan elemen terkait lainnya," kata politisi F-PKS itu.

Sementara itu, Kapolda Aceh, Rio Septianda Djambak menyatakan, memang kami akui pada pilkada sebelumnya ada

intimidasi serta teror yang sifatnya mengancam.

"Berangkat dari hal itu, maka, kami meminta bantuan kekuatan dari Kapolri sebanyak 1.900 personel Brimob. Nantinya mereka akan *mobile* ke wilayah pelosok dan desa-desa untuk mengantisipasi adanya intimidasi atau ancaman lainnya," terangnya.

Rio mengakui, pelaksanaan Pilkada di Aceh tidak bisa dianggap hal yang biasa. Untuk itu, dari awal kami sudah melakukan langkah-langkah antisipasi.

"Kita sudah melakukan pemetaan wilayah yang rawan konflik. Dengan Panwaslu juga kami sudah berkoordinasi agar tegas melakukan tindakan terhadap paslon yang melakukan tindak pidana," tegasnya.

Ia menambahkan, kami sepakat Pilkada di Aceh nanti berjalan aman dan damai, langkah-langkah antisipasi juga sudah dilakukan. Rio juga memohon doa dan dukungan kepada Komisi III DPR RI agar pilkada berjalan dengan baik. ■

(ib), Foto: Jakarta

Lembaga Pendis Perlu Perhatian Serius Pemerintah

Lembaga Pendidikan Islam (Pendis) masih belum mendapat perhatian serius dari pemerintah. Ini diungkapkan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Deding Ishak saat mengikuti pertemuan dengan Civitas Akademika IAIN Imam Bonjol Padang dan jajaran Kanwil Sumbar, di Kampus IAIN Imam Bonjol, Lubuklintah, Padang, baru-baru ini.

Menurutnya, kebijakan dan regulasi dari pemerintah pusat dan daerah belum menunjukkan keberpihakan pada lembaga Pendis. Selanjutnya, kata Deding, dari aspek tata kelola mulai dari manajemen pengelolaan lembaga pendidikan, SDM, sarana dan prasarana, juga belum memadai dan tidak optimal. Kondisi ini juga diperparah dari aspek anggaran yang dirasa belum berkeadilan.

Disparitas anggaran masih tinggi antara lembaga pendidikan di bawah Kemenag dan Kemendikbud serta Kemenristekdikti. Anggaran untuk pendidikan agama Islam dalam struktur anggaran pendidikan pada APBN masih sangat kecil, kata Deding. Dari data Kementerian Agama RI, alokasi anggaran pendidikan Islam selama 5 tahun terakhir selalu berada di kisaran angka 11%, tambahnya.

"Dampak dari minimnya anggaran tersebut, kebutuhan perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana lembaga pendidikan Islam tidak mencukupi," ujar politisi Partai Golkar. Oleh karena itu, Komisi VIII DPR RI telah membentuk Panitia

Pembangunan Infrastruktur Indonesia Timur Harus Jadi Skala Prioritas

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz mengatakan pembangunan khususnya infrastruktur di Indonesia Timur harus menjadi skala prioritas bagi pemerintah.

“Pembangunan di Indonesia Timur itu memang menjadi prioritas, terutama di daerah Sorong, Papua Barat dan sekitarnya, tidak bisa disamakan dengan di Pulau Jawa, karena bahan materialnya disini (Indonesia Timur-red) memang lebih mahal ketimbang yang ada di Jawa,” kata Neng Eem Marhamah kepada Parlementaria, usai meninjau sejumlah infrastruktur perhubungan dan air bersih di Kota Sorong, Papua Barat, baru-baru ini. Peninjauan juga dalam rangka kunjungan kerja Komisi V DPR RI di masa reses.

Seperti diketahui, dalam masa reses DPR RI kali ini, kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi Papua Barat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI Michael Wattimena juga diikuti sejumlah Anggota Komisi V DPR RI diantaranya; Yoseph Umar Hadi (F-PDIP), Daniel Mutaqien Syafiudin (F-PG), Hamka B Kady (F-PG), Ade Rezeki Pratama (F-Gerindra), Moh. Nizar Zahro (F-Gerindra), Anton Sukartono Suratto (F-PD), Agung



Tim Kunker Komisi V DPR RI meninjau sejumlah infrastruktur perhubungan dan air bersih di Papua Barat

Budi Santoso (F-PD) Syahrulan Pua Sawa (F-PAN), Fathan (F-PKB), Soehartono (F-Nasdem), Djoni Rolindrawan (F-Hanura).

Politisi PKB itu juga melihat pembangunan di Indonesia Timur dalam hal ini Pelabuhan Sorong sangat dibutuhkan dan perlu ditingkatkan kembali dari sisi infrastrukturnya. "Saya melihat untuk kapasitas peti kemasnya memang sangat minim, sedangkan Sorong menjadi pusat hubungan di wilayah Papua Barat," ujarnya.

Terlebih lagi, tambahannya, Pelabuhan

Sorong dikelola oleh Pelindo IV yang pernah mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebanyak Rp 2 triliun, dimana sekitar Rp 275 miliar dialokasikan untuk pengembangan Pelabuhan Sorong.

Terkait dengan infrastruktur jalan, Neng Eem meyakini bahwa hal tersebut adalah mutlak. "Kalau masalah infrastruktur jalan, saya kira itu mutlak, bagaimana jalan akan terhubung antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Bila perlu dari Sabang sampai Merauke itu terhubung. Apabila melewati laut

maka ada tol laut, apabila melewati darat maka jalan arteri dan jalan nasional sudah ada," jelasnya.

"Saya kira menjadi kewajiban untuk mendukung bagaimana Nawacita Presiden Jokowi bisa diwujudkan, sehingga benefitnya bisa dirasakan untuk masyarakat. Dan konektivitas antara satu dengan yang lainnya bisa tersambung serta manfaatnya tentu rakyat yang akan merasakan, yang mana harga barang dan jasa antara satu dan lainnya akhirnya tidak berbeda jauh, disparitasnya tidak terlalu menganga," tambahannya. ■

(16), Foto: Nita/br



Suasana pertemuan Tim Kunker Komisi VIII DPR RI dengan sejumlah mitra kerja Pendidikan Islam

Kerja (Panja) Tata Kelola dan Anggaran Pendidikan Islam, yang tujuannya memfokuskan pada pembahasan pengelolaan pendidikan Islam, mengidentifikasi berbagai persoalan lembaga

pendidikan Islam, baik dari aspek kebijakan dan regulasi, anggaran, kelembagaan, SDM, dan tata kelola yang selanjutnya merekomendasikan alternatif solusi atas berbagai permasalahan tersebut, jelasnya.

"Ini adalah sebagai wujud tanggung jawab dan kesadaran peran strategis lembaga pendidikan Islam, mulai dari pondok pesantren, madrasah ibtidaiyah, sampai perguruan tinggi," ungkapnya.

Keberadaan lembaga pendidikan Islam memiliki sejarah yang khusus terhadap pembangunan SDM Indonesia selama ini, kata Deding, seraya menambahkan, lembaga pendidikan Islam juga terbukti telah melahirkan para pemimpin yang berkualitas.

"Namun berbagai permasalahan yang dialami oleh lembaga pendidikan Islam belum menjadi perhatian serius dan sungguh-sungguh dari pemerintah," tutupnya. ■

(16), Foto: Iwan/br

Pansel Gelar Seleksi Terbuka Jabatan Sekjen DPR RI

Ketua Panitia Seleksi (Pansel) sekaligus Sekretaris Jenderal DPR RI, Winantuningtyas Titi Swasanany menggelar seleksi terbuka untuk jabatan pimpinan tinggi Madya di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Seleksi tahap kedua yang beragendakan penulisan makalah ini berlangsung di Gedung Setjen DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (07/10).

“Alhamdulillah puji syukur, pagi hari ini kita diberikan kelancaran untuk melaksanakan kegiatan hari ini. Kita mengusahakan supaya berjalan tepat waktu sehingga sesuai dengan *time-schedule* yang sudah diberikan, karena sangat mepet dan kita tidak punya waktu panjang,” ujar Win, panggilan akrab Winantuningtyas Titi saat membuka

seleksi untuk
J a b a t a n
S e k j e n
D P R R I.

Lebih
l a n j u t,
W i n



Sekjen DPR RI Winantuningtyas Titi Swasanany

memaparkan bahwa pendaftaran seleksi jabatan pimpinan tinggi Madya itu telah dilakukan secara terbuka. Sebelumnya, pendaftaran berlangsung secara online dan diikuti oleh 16 orang dari berbagai lembaga maupun Kementerian. Namun, hanya 7 orang berhasil lulus ke tahap selanjutnya, yaitu penulisan makalah.

Adapun ketujuh peserta yang lulus penilaian administrasi ialah Damayanti, Rahayu Setya Wardani, Setyanta Nugraha, Djaka Dwi Winarko, Mardian Umar, Rudi Rohmansyah dan Karjono.

Menurut Win, seleksi tahap dua ini cukup penting karena menjadi salah satu tolak ukur seberapa jauh pendalaman peserta terkait fungsi serta peran Setjen sebagai *supporting system* dalam meningkatkan kinerja dewan. Setelah itu, pada tahap selanjutnya, Panitia Seleksi akan melibatkan pihak ketiga untuk melakukan evaluasi dan *assessment*.

"Nanti ada *assessment* yang akan melibatkan pihak

ketiga, yang punya kompetensi untuk melakukan itu. Jadi, masih ada tahapan lagi seperti wawancara dan kita harapkan juga ada semacam *medical check-up*," jelasnya.

Kepada peserta yang terpilih nantinya, Win berharap kompetensi peserta terpilih semakin ditingkatkan dan harus memiliki integritas. Mengingat, jabatan sekjen cukup dinamis dan jam kerjanya yang tidak terbatas waktu.

"Tantangan ke depan itu lebih berat, sekarang pun dinamikanya luar biasa tinggi, bahkan tidak kenal waktu, jadi harus ada keikhlasan dan tentu harus berintegritas. Tidak hanya cepat tetapi juga harus cerdas," tandas wanita yang menjabat Sekretaris Jenderal sejak tahun 2013 itu.

Sebanyak 5 peserta yang mengikuti tahapan seleksi kedua ini, yakni penulisan makalah. Adapun tema makalah sudah ditentukan oleh Pansel dan bersifat rahasia. Selain itu, Pansel juga menyiapkan fasilitas pendukung seperti komputer jinjing untuk para peserta seleksi terbuka. ■

(am.mp) Foto: Juyudi/br

Arsip Sebagai Alat Bukti Akuntabilitas Kinerja

Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Sekretariat Jenderal DPR RI menggelar seminar yang bertajuk "Kepastian Hukum Pengelolaan Arsip Sebagai Alat Bukti dan Akuntabilitas Kinerja" Selasa, (08/11) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Seminar ini dimaksudkan untuk memberikan pengarahan terkait pengelolaan arsip sebagai alat bukti untuk mengukur kinerja lembaga negara. Hadir sebagai pembicara yakni Zita Asih Suprastiwi dari Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan ANRI.

Kepala Pusdatin Setjen DPR RI, Saiful Islam mengatakan seminar ini sesuai amanat UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan UU No 14

tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kedua UU tersebut menempatkan arsip sebagai pilar penting dalam upaya memberikan informasi kepada publik yang membutuhkan.

"Adapun dasar hukum seminar kearsipan ini adalah UU No 42 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Maksud apresiasi adalah merupakan suatu kegiatan sosialisasi bidang kearsipan dalma

rangka meningkatkan pengetahuan dan keahlian dalam mengelola arsip di lingkungan Setjen DPR RI," jelas Saiful.

Saiful menjelaskan, salah satu bidang kearsipan yang cukup penting yakni soal risalah. Namun sayang kini, jumlah staf di bidang Risalah terus mengalami pengurangan. Ia pun juga memaparkan pekerja transkriptor adalah sesuatu yang kurang diminati banyak orang, namun keberadannya sangat penting.



Kepala Pusdatin Setjen DPR RI Saiful Islam

"Transkripsi menjadi dominasi pekerjaan yang rutin oleh risalah, ironisnya Bidang Risalah yang

cukup berat seiring dengan semakin banyaknya tugas DPR RI. "Dalam kaitan ini, mengenai tugas risalah,

dahulu berjumlah 40 transkriptor, sekarang transkriptornya tinggal 19. Pekerjaan yang mungkin tidak menarik minat orang tapi ini sangat diperlukan," ujarnya.

Ia pun menegaskan tugas risalah memiliki beban yang

harapan kami tidak hanya mengandalkan pada bagian risalah, karena tugas DPR RI makin banyak, kalau mengandalkan bagian risalah yang stafnya berkurang," tuturnya.

Dalam kesempatan ini, Zita Asih menjelaskan bahwa penciptaan arsip harus dilakukan dengan autentik. Hal itu berfungsi sebagai bahan dan bukti mengenai akuntabilitas kinerja, sehingga harus dikelola secara benar. "Arsip yang autentik, utuh dan terpercaya berfungsi sebagai bahan dan bukti akuntabilitas kinerja serta alat bukti yang sah," jelas Zita. ■

(bamp), Foto: Azka/br

DPRD Pati Konsultasi Peran Bamus dengan Sekjen DPR RI

Sekretariat Jenderal DPR RI Winantuningtyas Titi Swasanany menerima sejumlah anggota DPRD Kabupaten Pati. Kedatangan anggota DPRD Pati kali ini untuk melakukan konsultasi terkait peran dan sistem kerja Badan Musyawarah (Bamus) di Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (03/10/2016).

Win-sapaan Sekjen DPR RI menjelaskan, peran Bamus sangat vital dalam menjalankan seluruh kegiatan yang terkait dengan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Terutama dalam hal penyusunan agenda, Bamus menetapkan jadwal berbagai kegiatan AKD dan memberikan penugasan suatu pembahasan kepada alat kelengkapan dewan yang tepat serta melakukan kontrol sehingga seluruh rapat bisa berjalan dengan efektif.

Anggota Bamus terdiri dari unsur pimpinan Komisi, Badan maupun Fraksi dan bersifat tetap sehingga peran Bamus dinilai cukup strategis dalam menentukan kinerja DPR RI. "Peran Bamus sangat menentukan kinerja DPR RI. Sebab, semua tergantung pada kualitas penyusunan agenda dan anggotanya juga pimpinan komisi dan fraksi. Oleh karena itu, semua kebijakan penting yang dilahirkan harus melalui rapat Bamus, meskipun akhirnya disahkan dalam Rapat Paripurna," jelasnya.



Sekjen DPR RI Winantuningtyas Titi Swasanany bersama sejumlah anggota DPRD Kabupaten Pati

Diakui Win, ada sedikit perbedaan antara tatib DPR RI dan tatib DPRD karena tugas dan fungsi DPRD diatur juga dalam Permendagri. Namun, Win menilai, berjalannya operasional internal tetap merujuk pada peraturan internal sehingga peran Bamus di DPRD dapat berjalan dengan optimal.

"Produk hukum dari DPRD harus ditaati, jadi tidak bisa sewenang-wenang pimpinan untuk mengubah keputusan yang sudah ditetapkan dalam rapat musyawarah karena produknya bukan

produk sektoral atau perorangan. Kuncinya memang ada di peraturan tata tertib," imbuh wanita yang sudah menjabat Sekretariat Jenderal sejak tahun 2013 itu.

Menanggapi itu, Wakil Ketua DPRD Kab. Pati Joni Kurnianto optimis permasalahan yang tengah dihadapi Bamus DPRD Pati dapat terselesaikan. Dikemukakannya, anggota Bamus DPRD sering dianggap sepele dan tidak mempunyai otoritas dalam merancang kegiatan-kegiatan DPRD

Pati. Untuk itu, pihaknya ingin mendapatkan informasi yang lebih komprehensif peran Bamus sebagaimana mestinya.

"Terkadang di daerah anggota Bamus itu seperti tidak punya *power* atau wewenang, kalau mau di tempatkan di Bamus, tidak ada yang mau. Tapi, teman-teman sudah mendapat motivasi bahwa peran Bamus itu sangat vital, jika kegiatan itu tidak dilalui oleh Bamus maka tidak sah, tadi ditegaskan seperti itu," tandasnya. ■

(bki), Foto: Jaka/br

Dewan Harapkan Dana Otsus Digunakan untuk Mendukung Pendidikan Tinggi

Ketua Komisi X DPR RI Teuku Riefky Harsya berharap, dana Otonomi Khusus untuk Papua, digunakan untuk mendukung pendidikan, khususnya untuk Perguruan Tinggi Negeri di Papua. Pasalnya, dukungan dari Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dirasa masih minim.

Demikian dikatakannya usai pertemuan dengan Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, beserta jajaran dan para rektor Universitas Cenderawasih, Universitas Musamus Merauke, Institut Seni dan Budaya Indonesia, Papua, di Jayapura, Provinsi Papua, baru-baru ini. Pertemuan ini dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI ke Provinsi Papua, dalam reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2016/2017.

"Kami mendapat masukan dari para rektor PTN di Papua, terkait dana BOPTN yang minim, minimnya sarana prasarana universitas tersebut, hingga permasalahan beasiswa. Ketiga hal tersebut dirasa sangat mengganggu proses peningkatan SDM di Papua," kata Riefky.

Untuk itu, politisi F-Partai Demokrat itu menyarankan kepada Kemenristekdikti untuk mengkaji penggunaan dana Otsus, untuk mendukung PTN dalam menjalankan operasionalnya. Riefky menilai, dana pendidikan dari Otsus sudah ada, namun masih minim. Minimnya bantuan terhadap PTN itu dikhawatirkan mengganggu proses belajar mengajar.

"Kalau dilihat secara regulasi umum, untuk penggunaan dana Otsus untuk PTN itu tidak sesuai. Tapi perlu payung hukum khusus untuk daerah Otsus untuk mengejar ketertinggalan dalam mendukung SDM lebih berkualitas lagi," imbuh Riefky.

Politisi asal dapil Aceh itu sepakat, perlu adanya sebuah terobosan untuk Papua dalam mengejar sektor pendidikan yang masih tertinggal. Ia menilai, perlu ada dukungan dalam mengejar ketertinggalan itu. Apalagi,

anggaran Otsus yang cukup besar pun belum ada regulasinya dalam penggunaannya untuk membantu PTN.

"Dukungan dari dana Otsus itulah yang kita harapkan bisa digunakan untuk membantu PTN, sehingga Papua bisa menjadi pabrik manusia yang mempunyai wawasan di bidang masing-masing. Tapi untuk hal ini, kami minta dikaji terlebih dahulu. Apabila itu bisa, kita akan minta payung hukum agar dapat membantu PTN di Papua dari dana Otsus," tutup Riefky.



Ketua Komisi X DPR RI Teuku Riefky Harsya bersama Wakil Gubernur Papua

Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI Sri Meliyana mengungkapkan, permasalahan pendidikan tinggi di Papua harus dibicarakan secara khusus. Politisi F-Gerindra menilai, Papua harus memetakan kebutuhan sarjana apa yang dibutuhkan dalam rangka membangun Papua. Dan hal itu perlu dikomunikasikan kepada Kemenristekdikti.

"Jadi ada komunikasi antara Pemda dengan Kemenristekdikti, sehingga bisa ketemu kebutuhan daerah dengan beasiswa yang diberikan. Apalagi tadi dalam pertemuan, perwakilan Kemenristekdikti juga berjanji akan memanggil rektorat PTN di Papua untuk mengkomunikasikan masalah keinginan beasiswa dari Papua," jelas Meli, panggilan akrab Sri Meliyana.

Khusus untuk pendidikan kedokteran, politisi asal dapil Sumsel itu mendapatkan info bahwa kuotanya cukup minim. Menurutnya, Kemenristekdikti tidak menghalangi putera-puteri Papua untuk melanjutkan jenjang ke pendidikan kedokteran, namun karena kedokteran itu membutuhkan tingkat akademis yang memadai dalam melaksanakannya.

Sementara itu sebelumnya, para rektor mengeluhkan minimnya BOPTN, mengeluhkan minimnya bantuan operasional untuk perguruan tinggi yang mereka pimpin. Termasuk kuota untuk jumlah mahasiswa penerima beasiswa ditingkatkan.

Kunjungan kerja ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih (F-PKS/dapil Jateng), dan juga diikuti oleh Anggota Komisi X DPR RI dari F-PDI Perjuangan yakni Asdy Narang (dapil Kalteng), Sofyan Tan (dapil Sumut), MY Esty Wijayati (dapil DI Yogyakarta) dan SB Wiryanti Sukamdani (dapil DKI Jakarta).

Kemudian Bambang Sutrisno (F-PG/dapil Jateng) dan Noor Achmad (F-PG/dapil Jateng). Dari Fraksi Partai Gerindra yakni Dwita Ria (dapil Lampung). Berikutnya Edhie Baskoro Yudhoyono (F-PD/dapil Jatim), Rinto Subekti (F-PD/dapil Jateng). Kemudian dari F-PAN Laila Istiana (dapil Jateng), dan Yayuk Basuki (dapil Jateng). Kemudian dari F-PKB Lathifah Shohib (dapil Jatim), SY. Anas Thahir (F-PPP/dapil Jatim), Yayuk Sri Rahayuningsih (F-Nasdem/dapil Jatim), dan Dadang Rusdiana (F-Hanura/dapil Jabar). ■

Pengembangan Bandara Marinda Raja Ampat Diharap Tingkatkan Pariwisata

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Michael Wattimena berharap pengembangan infrastruktur Bandara Marinda Raja Ampat bisa meningkatkan sektor pariwisata baik lokal maupun internasional. Pasalnya, infrastruktur di bidang transportasi menuju Raja Ampat dinilai masih minim.

Alagi sudah ada instruksi dari Presiden Joko Widodo yang meminta *runway* (landasan bandara-red) minimum sepanjang 2.000 meter. Kondisi saat ini Bandara Marinda Raja Ampat hanya memiliki panjang 1.400 meter, dan untuk tahun anggaran 2017, kata Michael Wattimena, ada penambahan *runway* sepanjang 200 meter menjadi 1.600 meter.

"Diharapkan untuk bandara, pesawat berbadan besar itu bisa mendarat disini, berarti minimum *runway* harus sekitar 1.700, tetapi normalnya kalau bisa 2.000 meter, makanya dari Komisi V DPR RI salah satu objek kunjungan kami dalam reses ini ke Marinda supaya dengan adanya pengembangan lapangan terbang Marinda ini ada peningkatan terhadap pariwisata, baik lokal maupun juga internasional," kata Michael kepada Parlemenaria, saat meninjau Bandara Marinda, Sorong, Papua Barat, baru-baru ini dalam rangka kunjungan kerja masa reses DPR RI.

Politisi dari Partai Demokrat itu mengatakan, banyak orang menganggap kunjungan ke Raja Ampat biayanya sangat tinggi, salah satunya menyangkut soal aspek biaya penerbangan. "Saat ini baru pesawat Susi Air yang berkapasitas 12 penumpang dan itu tidak rutin, setiap hari satu penerbangan, itu pun cuma tiga kali, Senin, Rabu dan Jumat. Kalau kita mau lebih peningkatan nasional, maka penerbangan itu minimal satu hari sekali dan kalau bisa pesawat berbadan besar bukan pesawat penumpang kecil seperti yang sekarang ini," ujarnya.

Michael yang memimpin rombongan kunjungan kerja Komisi V DPR RI itu berharap pemerintah pusat memberikan perhatian khusus bagi pengembangan bandara ini, terlebih Bandara Marinda ini salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

"Kaitan dengan masalah KSPN, kami Komisi V DPR RI mengharapakan infrastrukturnya semua itu bisa dapat menunjang peningkatan pariwisata nasional, bukan saja di Raja Ampat, karena dengan hadirnya wisatawan baik domestik atau manca negara, otomatis akan berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada khususnya di sekitar sini," katanya.

Michael mengatakan kehadiran Komisi V DPR RI dalam kunjungan kerja ke Sorong, Papua Barat ini selain mengecek kondisi infrastruktur yang terkait di



Tim Kunker Komisi V DPR RI saat meninjau Bandara Marinda di Papua Barat

Kementerian Perhubungan (Kemhub) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenuw) di wilayah setempat seperti bandara dan pelabuhan laut, juga melihat aksesibilitas menuju ke sarana-sarana transportasi apakah bisa ditempuh dengan baik.

"Kita juga mau lihat akses jalannya ke bandara dan pelabuhan laut bisa ditempuh dengan baik atau tidak," katanya.

Kunjungan kerja kali ini diikuti oleh anggota Komisi V DPR RI, diantaranya, Yoseph Umar Hadi (F-PDIP), Daniel Mutaqien Syafiudin (F-PG), Hamka B Kady (F-PG), Ade Rezeki Pratama (F-Gerindra), Moh. Nizar Zahro (F-Gerindra), Agung Budi Santoso (F-PD), Anton Sukartono Suratno (F-PD), Syahrulan Pua Sawa (F-PAN), Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz (F-PKB), Fathan (F-PKB), Soehartono (F-Nasdem), Djoni Rolindrawan (F-Hanura).

Sementara itu, Kepala Bandara Marinda Raja Ampat, Uspin mengatakan pihaknya saat ini hanya bisa melakukan kegiatan fisik seperti pelebaran *runway strip* dimana pelebaran ini dimaksudkan untuk pemenuhan standar yang mengarah ke pesawat yang memiliki tipe lebih besar sejenis pesawat ATR 72.

Uspin berharap awal tahun 2017 ini pihaknya bisa melakukan pengembangan lebih maksimal lagi. "Cuma tahap-tahap pengembangannya kita tidak bisa langsung, karena master plan bandara ini kan belum selesai," jelasnya. ■

(Inf). Foto: Nitar/Inf

JENDELA PARLEMEN

Sampaikan aspirasi Anda melalui SMS ASPIRASI DPR RI di 08119443344
@dpr_ri DPR RI @DPR_RI DPR RI



Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menjadi Inspektur Upacara pada acara tabur bunga di Laut perairan Teluk Jakarta, Kamis (10/11). Foto: Naefuroji

Kunker Komisi X DPR RI ke Manado meninjau pendidikan vokasi di SMKN 1 Airmadidi dan melihat kerusakan gedung aula SMAN 1 Airmadidi, Senin, (31/10) Foto : ray



Deputi Persidangan DPR RI Damayanti didampingi Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Djaka Dwi Winarko menyerahkan cenderamata kepada peserta terbaik Parlemen Remaja 2016, Kamis (10/11) Foto: Arief